

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sekadau

Sinlilika ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Arifin ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: ¹⁾ e2072231015@student.untan.ac.id ;²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id
³⁾ arifin@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Oktober 2025]
Revised [28 Januari 2026]
Accepted [30 Januari 2026]

Keywords

Policy, Tourism,
Communication, Resources,
Disposition, Bureaucratic
Structure.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada kurangnya komunikasi antara aparat pemerintah Kabupaten Sekadau dengan masyarakat, terbatasnya sumber daya, lemahnya disposisi atau sikap pelaksana, dan belum tersediannya SOP dalam pengembangan objek wisata. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada potensi objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau belum berjalan dengan efektif dilihat transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana belum sepenuhnya dilaksanakan. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata masih terbatas, baik dilihat dari ketercukupan tenaga pelaksana, ketersediaan informasi yang masih minim, kewenangan yang masih terbatas maupun ketersediaan fasilitas. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi informasi yang akurat, Kejelasan informasi, Konsistensi terhadap perintah, Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.

ABSTRACT

The problems in this research stem from the lack of communication between Sekadau Regency government officials and the community, limited resources, weak disposition or attitude of implementers, and the unavailability of SOPs for developing tourist attractions. The aim of this research is to describe and analyze communication, disposition, resource and bureaucratic structure factors in the implementation of tourism development policies on the potential community-based natural tourist attraction of Air Terjun Batu jato National Park in Taman District, Sekadau Regency. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The results of this research indicate that the implementation of communication in the context of developing the community-based natural tourist attraction of Air Terjun Batu jato National Park in Taman District, Sekadau Regency has not been running effectively, seen as the transmission or distribution of communication is not accurate, the clarity of information is still lacking, and the consistency of policy implementation is weak. . The disposition or attitude of the implementer has not been fully implemented. The resources available for developing tourist attractions are still limited, both in terms of the adequacy of implementing staff, the availability of information which is still minimal, the authority which is still limited and the availability of facilities. Then the implementation of the bureaucratic structure for policy implementation does not yet have a Standard Operational Procedure (SOP), and fragmentation is weak. Suggestions or recommendations in order to improve the implementation of communication, disposition, resources and bureaucratic structure, it is necessary to transmit accurate information, accuracy of information, consistency with orders, placement of appropriate personnel, increase incentives, increase the number of staff, information in policy implementation, authority formal ones, supporting facilities, creating SOP and the need for coordination in order to overcome fragmentation.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang, Nomor: 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, akan memberikan peluang yang sangat luas, bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuklah potensi sektor pariwisata. Karena saat ini Kabupaten Sekadau telah menjadi salah satu tujuan wisata di Kalimantan Barat. Destinasi Kabupaten Sekadau sebagai destinasi wisata di Kalimantan Barat yang didukung oleh berbagai keunikan dan keberagaman daya tarik yang telah dikemas menjadi paket wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Lima destinasi wisata yang bisa di kunjungi, di antaranya wisata Air terjun gunung sumpit, air terjun sirin pundi, air terjun

semirah merambang, air terjun entugu, air terjun cuci kain, air terjun batu jato, batu tinggi. Bukit burang, goa lawing kuari, dan palak kaba.

Kabupaten Sekadau bahwa sesungguhnya merupakan daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya maupun wisata religi. Daratan yang indah, sungai-sungai dan air terjun dapat dijadikan sebagai obyek wisata alam. Demikian pula kekayaan budaya yang berupa adat-istiadat, kesenian, sejarah, dan budaya hidup masyarakat serta berbagai keterampilan yang dimiliki masyarakatnya untuk membuat kerajinan tangan dan industri rumah tangga lainnya dapat jua dijadikan sebagai daya tarik wisata budaya. Disamping itu berbagai peninggalan sejarah seperti makam-makam bersejarah yang tersebar di berbagai tempat merupakan obyek wisata religi yang tak kalah menariknya serta menjadi daya tarik yang tiada ternilai harganya baik bagi masyarakat/wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.

Kebijakan strategis yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, melalui pengembangan strategi kebijakan pembangunan pariwisata adalah mengembangkan pariwisata menjadi sektor yang paling penting bagi perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Sekadau yang berbasis dan berwawasan lingkungan dengan citra tersendiri. Sedangkan misinya adalah mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta memberikan petunjuk kelompok sasaran yang dilayani.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki cukup banyak potensi objek wisata yang saat ini masih belum dikembangkan, baik berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah untuk ruang lingkup Kabupaten Sekadau. Potensi pariwisata yang dimiliki diharapkan dapat menjadi sektor andalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025, Kabupaten Sekadau termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (PKPN) yang pada dasarnya merupakan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik wisata, seperti Air terjun gunung sumpit, air terjun sirin panti, air terjun semirah merambang, air terjun entugu, air terjun cuci kain, air terjun batu jato, batu tinggi. Bukit burang, goa lawing kuari, dan palak kaba.

Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan menunjukkan, bahwa potensi objek wisata yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau adalah objek wisata alam Air Terjun Batu jato yang selama ini belum dikelola atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor: 16 Tahun 2005, tentang kebijakan pembangunan pariwisata. Hal tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komunikasi antara aparat pemerintah Kabupaten Sekadau dengan masyarakat, sehingga menimbulkan kerusakan atau perubahan permanen lingkungan fisik pada potensi objek wisata dalam kawasan-kawasan historis/budaya serta sumber-sumber alam, kurangnya pemeliharaan asset wisata tersebut dan belum tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran lalu lintas pada objek wisata.
- b. Lemahnya sikap pelaksana, sehingga menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan tersebut. Karena kurang perannya personel terhadap pembangunan kepariwisataan.
- c. Sumber daya manusia yang tersedia baik kualitas maupun kuantitas seperti jumlah aparat, kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dari para pelaksana yang masih terbatas, sehingga kurang membetrakan kontribusi dalam organisasi.
- d. Struktur birokrasi belum kondusif terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Hal tersebut terlihat belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP).

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut teori Edward III (dalam Tachjan, 2008:56) ada empat hal yang mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi yaitu penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan
2. Sumber daya, yaitu diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; yang diposisikan sebagai input dalam organisasi yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.
3. Disposisi /sikap pelaksana, yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik

4. Struktur Birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Baik melalui Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”

METODE PENELITIAN

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah, sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Faisal (2024:12) bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini”. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas adalah di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Alasan pemilihan lokasi adalah implementasi kebijakan potensi objek wisata alam seperti wisata Air Terjun Batu jato di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau belum dikembangkan (dikelola) atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau secara optimal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Potensi Objek Wisata Air Terjun Batu jato

Pelaksanaan komunikasi melalui sosialisasi atau penyuluhan terhadap aturan suatu kebijakan pengembangan pariwisata, diperlukan kejelasan informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan secara komunikatif. Untuk itu, dalam menjalin hubungan timbal balik melalui suatu komunikasi antara petugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sekadau dengan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah hubungan kerja sama. Karena dalam proses komunikasi terdapat penyampaian informasi sebagai interaksi antar seseorang dengan orang lain. Seorang menyampaikan pesan, penerima bereaksi, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah merespon dari orang kedua. Disini diperlukan kejelasan informasi dalam berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disporapar Kabupaten Sekadau, diperoleh keterangan bahwa: Dalam rangka mempromosikan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman yang ada di Kabupaten Sekadau, melaksanakan peningkatan dan pengembangan jaringan informasi pembangunan masyarakat di bidang pariwisata dan melaksanakan pelayanan informasi secara komunikatif. Karena sampai saat ini objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau baru berkembang dengan skala kegiatan yang masih terbatas pada wisatawan lokal, sehingga visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis wilayahnya yang relatif jauh. Namun demikian tekad pemerintah daerah Kabupaten Sekadau untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui penyaluran komunikasi menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang terus dikembangkan”.

Pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa penyaluran komunikasi yang dilakukan Disporapar Kabupaten Sekadau, bertujuan dalam rangka. meningkatkan peranan masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola dan memanfaatkan potensi dan keindahan alam serta budaya setempat. Penyaluran komunikasi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi atau penyuluhan akan menentukan aktifitas dan perilaku yang diharapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dilakukan pada saat rapat koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Sekadau. Karena tanpa komunikasi yang jelas, maka masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui akan adanya objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman yang ada di Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa pengembangan program pariwisata oleh Disporapar melalui penyaluran komunikasi, belum dilaksanakan secara maksimal, dimana implementor belum bisa merancang pesan program dalam membentuk pesan yang konsisten. Pesan yang disampaikan kurang menarik perhatian (attention), tidak menimbulkan minat (interest), kurang memicu keinginan (desire), sehingga kurang mendorong masyarakat ingin berbuat atau melakukan sesuatu dalam program pengembangan pariwisata.

Keberhasilan dalam mempublikasikan program kebijakan pengelolaan pengembangan obyek wisata Objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten

Sekadau berbasis komunitas tidak terlepas dari keberadaan media sebagai sarana pendukung dalam menginformasikan kegiatan kepada masyarakat. Oleh karena saluran atau media merupakan alat atau wahana yang digunakan sebagai sumber untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat.

Image yang muncul dalam masyarakat bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan sebuah proyek saja. Dengan demikian, dapat dikatakan program yang dilaksanakan oleh Disporapar Kabupaten Sekadau belum mendapat respon secara positif. Disisi lain kesadaran masyarakat terutama di bidang pariwisata masih rendah, sehingga untuk menggalakkan masyarakat dalam memahami program kebijakan pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau berbasis komunitas, diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk lebih pro aktif dalam rangka pengembangan di bidang pariwisata.

Disposisi/sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Potensi Objek Wisata Air Terjun Batu jato

Hal penting yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengembangan pariwisata pada kawasan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas adalah terkait masalah disposisi. Harus ada kemauan dan kepatuhan dari para implementor dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya agar tercapai tujuan dari pelaksanaan perda itu sendiri. Implementor baik harus memiliki sikap yang baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Sikap pelaksana dalam pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau berbasis komunitas, yaitu menyangkut strategi yang telah dilakukan saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disporapar Kabupaten Sekadau, diperoleh keterangan bahwa:

Komitmen yang dilakukan sebagai bentuk disposisi dalam mendukung program pengembangan obyek wisata tersebut, ditetapkan dengan melalui diversifikasi jenis kegiatan wisata yang akan dikembangkan dengan mengeksplorasi sesuatu yang baru serta pengaturan rute wisata, intensifikasi dan revitalisasi objek-objek wisata yang telah ada, strategi diversifikasi jenis kegiatan wisata dan pengaturan rute wisata diarahkan untuk dapat memberikan keragaman pengalaman dan pilihan kepada wisatawan yang melakukan kegiatan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, terlihat ada dua faktor yang belum terimplementasinya kebijakan tersebut, seperti: pengangkatan birokrasi dan insentif.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa Kepala Disporapar Kabupaten Sekadau yang bertindak sebagai implementor, telah mendistribusikan tugas dan wewenangnya kepada anggota tim kelompok kerja yang dibawahinya. Sehingga Kepala Disporapar hanya bertindak sebagai koordinator, sedang yang menjalankan tugas dan wewenangnya adalah anggota tim kelompok kerja yang berada dibawahinya, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang terkait dengan program pengembangan pariwisata. Seluruh aparat pelaksana tersebut tidak hanya dituntut untuk menerima adanya kebijakan program pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman berbasis komunitas, namun lebih dari itu mereka lebih dituntut untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya dan mewujudkan tujuan serta target-targetnya.

Komitmen hendaknya dimiliki oleh segala lapisan, baik dari berbagai lapisan pemerintahan, juga berbagai lapisan masyarakat agar semua memiliki rasa memiliki program dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Komitmen yang diharapkan hendaknya berupa wujud nyata melalui program dan kegiatan pengembangan obyek wisata berbasis komunitas yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan program. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, namun prioritas terhadap jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan dari program perlu untuk ditingkatkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporapar khususnya bidang pariwisata hendaknya dilakukan secara terintegrasi.

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Potensi Objek Wisata Air Terjun Batu jato

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sumber daya disini tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur. Karena Sumber Daya Aparatur sebagai pelaksana kebijakan pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, pengetahuan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, system proses dan teknis dalam birokrasi serta cara penerapannya.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sekadau tidak bisa berdiri sendiri melainkan bekerjasama dengan pihak swasta sebagaimana

yang berjalan sekarang ini namun harus ada peningkatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sekadau dapat dimanfaatkan dan direkrut untuk melakukan pengembangan pariwisata berbasis komunitas didaerahnya, hal ini harus ditunjang oleh pendidikan dan keterampilan aparatur di bidang pariwisata.

Berdasarkan wawancara dengan Kapala Bidang Pariwisata, menyatakan bahwa:Aparatur yang menangani bidang kepariwisataan sebanyak 6 orang, hanya 1 (satu) orang yang tingkat pendidikan spesialisasi Diploma III kepariwisataan. Sementara yang menyandang sarjana S-1 sebanyak 16 orang tidak satupun dengan spesialisasi sarjana kepariwisataan, melainkan sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Sosial dan Sarjana Ilmu pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditelaah bahwa pentingnya Sumber daya Aparatur yang handal dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan potensi Pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Sekadau dimaksudkan bahwa sektor pariwisata merupakan andalan yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi terkait, sehingga pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah meningkat dari waktu ke waktu.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan langsung kepada masyarakat disekitar objek objek wisata alam Air Terjun Batu jato menyatakan bahwa Disporapar yang mempunyai wewenang untuk memberikan sosialisasi langsung kemasyarakat secara langsung masih kurang memuaskan dikarenakan kekurangan tenaga staf teknis yang dapat langsung terjun kemasyarakat, terlebih lagi dikarenakan wilayah yang ada di Kabupaten Sekadau sangat luas.Berdasarkan hasil observasi usng diakukan, terlihat jelas walaupun keadaan pegawai yang minim ditambah lagi dengan terbatasnya fasilitas yang ada, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau sudah melakukan tugas dan fungsinya, meskipun belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap keberhasilan dan kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Sekadau.

Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Potensi Objek Wisata Air Terjun Batu jato

Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman berbasis komunitas bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Memahami masalah struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata berbasis komunitas. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Sekadau, akan dijabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor stuktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi.\

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan pembangunan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Sekadau telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur- prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau belum memiliki Standar Operating Procedur (SOP) secara khusus terkait pengembangan pariwisata, sehingga dalam membuat program masih mangacu pada Undang Undang Kepariwisataan dan juga RPJM Daerah Kabupaten Sekadau.

Keberhasilan ataupun kegagalan pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari struktur birokrasi atau bijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan pengembangan pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut harus berdampak terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah. Karena pariwisata merupakan produk, sehingga diperlukan upaya dalam rangka memasarkan produk tersebut.

Berdasarkan studi dokumentasi menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sekadau berupa Peraturan Bupati Sekadau Nomor: 11 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pengembangan

pariwisata di Kabupaten Sekadau dapat tercapai, disamping itu potensi objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman yang ada dapat dikembangkan sehingga pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Berdasarkan observasi lapangan dapat diketahui bahwa komitmen Pemerintah Daerah melalui Disporapar untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sekadau, dapat dilihat juga dengan dibuatnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) untuk tahun 2024.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa penyusunan RIPP dalam rangka pengembang obyek wisata di Kabupaten Sekadau ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akan strategi dan program pengembangan kawasan obyek wisata. Tujuan penyusunan RIPP kawasan wisata tersebut yang didasarkan pada kajian kepariwisataan secara komprehensif sehingga produk rencana tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar acuan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, dan kualitas lingkungan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman Kabupaten Sekadau belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan proses komunikasi melalui:
 - Transmisi atau penyaluran masih banyak ditemukan keputusan mengenai pengembangan obyek wisata yang diabaikan, sehingga sering terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.
 - Kurang jelasnya informasi mengenai kebijakan pengembangan obyek wisata kepada masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui program tersebut
 - Kurangnya konsistensi oleh pelaksanan kebijakan dalam menyebarkan informasi secara terus menerus dalam rangka pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman.
- b. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut terlihat dari:
 - Penempatan personel pelaksana kebijakan yang masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi ilmu kepariwisataan, sementara jangkauan pengembangan obyek wisata cukup luas.
 - Ketercukupan insentif pelaksana kebijakan masih rendah, sehingga mempengaruhi dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik terhadap pengembangan obyek wisata, karena masih ada upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- c. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat beberapa indikator antara lain:
 - Ketercukupan tenaga pelaksana, seperti kurangnya kecakapan yang dimiliki, kurangnya staf sehingga menimbulkan persoalan yang pelik meyangkut implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata yang efektif.
 - Ketersediaan informasi implementasi kebijakan yang masih minim dalam rangka pengembangan obyek wisata
 - Kewenangan sebagai otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan masih terbatas maka kekuatan para implementor dalam pengembangan obyek wisata dimata masyarakat kurang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
 - Fasilitas yang tersedia belum memadai, dan masih minim (belum optimal) kondisi perkantoran dalam melakukan koordinasi terhadap pengembangan obyek wisata.
- d. Pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan objek wisata alam Air Terjun Batu jato berbasis komunitas di Kecamatan Taman di Kabupaten Sekadau dewasa ini belum terlaksana sesuai dengan:
 - Standar Oprational Procedure (SOP), belum tersedia yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan obyek wisata sesuai dengan teknis, administratif, tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
 - Lemahnya fragmentasi sebagai bentuk penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan dalam melakukan koordinasi kepada instansi terkait dan masyarakat.

Saran

Memperhatikan mengenai Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau diperlukan penyikapan dari semua pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Agar pelaksanaan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien maka antara pemerintah daerah melalui Disporapar dengan masyarakat, perlu adanya:
 - Transmisi informasi yang akurat, seperti teknis alat komunikasi yang digunakan, tingkat keefektifan dalam penyampaian informasi dan ukuran data/informasi yang disampaikan
 - Kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
 - Konsistensi terhadap perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan
- b. Agar disposisi atau sikap pelaksana dapat diterima masyarakat dalam rangka pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata yang berbasis komunitas, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Disporapar dapat melakukan:
 - Penempatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
 - Insentif untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, sehingga akan mendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.
- c. Untuk merealisasikan sumber daya yang diinginkan, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu memperhatikan:
 - Penambahan jumlah staf atau pegawai. Karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
 - Informasi dalam implementasi kebijakan, dengan cara melaksanakan kebijakan. dan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan
 - Fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) perlu ditingkatkan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta peningkatan infrastruktur maupun supra struktur kepariwisataan
- d. Untuk merealisasikan struktur birokrasi yang diinginkan, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat melakukan beberapa tindakan antara lain:
 - Menciptakan SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan tugasnya dan mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
 - Perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi, sebagai upaya mengatasi pandangan yang sempit yang akan menghambat implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, 2012. Penelitian Kebijakan. Malaysia: Makalah disampaikan pada peretemuan peneliti Melayu Muda di Johor.
- Dharma, Agus, 2014, Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta: CV. Raja Wali.
- Faisal, Sanapiyah, 2024, Format-Format penelitian Sosial. Jakarta: CV. Rajawali
- Intruksi Presiden RI, Nomor 16 Tahun 2005, Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kotler, Philip, 2010, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Impelemtasi dan Pengendalian. Jakarta: FEUI.
- Mill, Robert, 2023, Tourism The International Business (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexi, J., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef, 2023. Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Mustopadidjaya, A.R., 2023, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Poerwadarminta. 2009. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Alumni

Rangkuti, Freddy, 2010, Analisis SWOT Teknik Membedah kasus Bisnis. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.

Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfa Beta.

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Wahab, Saleh, 2012, Manajemen Kepariwisata. Jakarta: PT. Paramitha.

Wahyudi, Agustinus Sri, 2023, Manajemen Strategik. Jakarta: Binarupa Aksara.

Wibawa, Samodra. 2023. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi, 2012, Teori Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.

Yoeti, A Oka. 2014, Perencanaan Strategis Pemasaran. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.